UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERESPON AGRESI ISRAEL DI GAZA PADA TAHUN 2023-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

FARAMITA RAHMADANY WIDYRIANTO

21323138

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERESPON AGRESI ISRAEL DI GAZA PADA TAHUN 2023-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

FARAMITA RAHMADANY WIDYRIANTO

21323138

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Diplomasi Indonesia dalam Merespon Agresi israel di Gaza pada Tahun 2023-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Februari 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
3. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 Februari 2025



Faramita Rahmadany Widyrianto

DAFTAR ISI

SKRIPSI i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR SINGKATAN vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Cakupan penelitian 6

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.6 Kerangka Pemikiran 9

1.7 Argumen Sementara 13

1.**8 Metode Penelitian** 13

1.8.1 Jenis Penelitian 13

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 14

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 14

1.8.4 Proses Penelitian 14

1.9 Sistematika Pembahasan 15

BAB 2 AGRESI ISRAEL TERHADAP GAZA PADA TAHUN 2023-2024 DAN RESPON INDONESIA 16

2.1 Agresi Militer Israel di Gaza tahun 2023-2024 16

2.2 Respon Internasional (Negara, NGos, Org. Internasional) 21

2.3 Kebijakan Indonesia terhadap isu Gaza, Palestina 25

BAB 3 UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERESPON AGRESI ISRAEL TERHADAP GAZA TAHUN 2023-2024 33

3.1 Catalyst 34

3.2 Facilitator 39

3.3 Manager 43

BAB 4 KESIMPULAN 49

DAFTAR PUSTAKA 51

DAFTAR SINGKATAN

OKI: Organisasi Kerja Sama Islam

OIC: Organization Islamic Cooperation

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

NGO: Non-Government Organization

UNRWA: United Nations Relief and Works Agency

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations

Hamas: Harakat al-Muqawama al-Islamiyyah (Gerakan Perlawanan Islam)

ABSTRAK

Pada konflik Palestina-Israel, agresi bersenjata antara Hamas dan Israel kembali meningkat pada tahun 2023, terutama setelah serangan mendadak Hamas ke Israel Selatan. Menggunakan pendekatan perilaku dalam *middle powers* dari Andrew F. Cooper, Richard A. Higgott, dan Kim Richard Nossal yaitu dengan berkomitmen terhadap *Catalyst, Facilitator,* dan *Manager* untuk menjelaskan upaya diplomasi Indonesia dalam merespon agresi Israel di Gaza pada tahun 2023 hingga 2024 tersebut. Indonesia menunjukkan komitmennya dengan terlibat aktif dalam upaya kemanusiaan dan kemampuan diplomasinya mengumpulkan suara dan dukungan untuk membela Palestina. Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan multilateral serta membangun koalisi dengan negara-negara muslim dalam organisasinya yaitu OIC. Melalui upaya diplomasi ini, Indonesia berusaha mempengaruhi kebijakan global terkait konflik Israel-Palestina, mendorong negara lain untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam mendukung perdamaian internasional. Maka demikian, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina, serta menunjukkan bahwa berdiplomasi sebagai *middle power* dapat menjadi alat yang cukup efektif untuk mengatasi konflik internasional yang kompleks.

Kata Kunci : Konflik Palestina-Israel, agresi bersenjata, Hamas, Israel, diplomasi Indonesia, *middle power diplomacy*

ABSTRACT

In the Palestinian-Israeli conflict, armed aggression between Hamas and Israel increased again in 2023, especially after the surprise attack by Hamas on southern Israel. Using the behavioral approach in middle powers from Andrew F. *Cooper, Richard A. Higgott, dan Kim Richar, namely by committing to Catalyst, Facilitator, and Manager to explain Indonesia's diplomatic efforts in responding to Israeli aggression in Gaza in 2023 to 2024. Indonesia showed its commitment by being actively involved in humanitarian efforts and its diplomatic skills to gather votes and support to defend Palestine. The Indonesian government also actively participates in international and multilateral forums and builds coalitions with Muslim countries in its organization, the OIC. Through these diplomatic efforts, Indonesia seeks to influence global policies related to the Israeli-Palestinian conflict and encourage other countries to take more proactive actions in support of international peace. Thus, Indonesia is committed to continue to support international efforts to achieve a just and sustainable peace for the Palestinian people, and to demonstrate that diplomacy as middle power can be an effective tool in resolving complex international conflicts.*

Keywords: *Palestinian-Israeli Conflict, Armed Aggression. Hamas, Israel, Indonesian diplomacy, middle power diplomacy*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Palestina-Israel adalah konflik perebutan wilayah yang telah berlangsung sejak 1948. Konflik militer ini terjadi karena dua negara tersebut sama-sama ingin menguasai wilayah yang sama dan konflik ini sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Dimulai dari Israel klaim wilayah melampaui batas yang telah ditentukan PBB, di mana wilayah tersebut adalah tanah milik Palestina termasuk bagian barat Yerusalem. Israel juga mengusir seluruh penduduk Palestina di daerah tersebut (Fitria and Putra 2022).

Palestina adalah tanah yang sangat diinginkan oleh orang-orang Yahudi Eropa. Namun, perebutan wilayah ini didasarkan pada kepentingan politik bukanlah konflik agama, karena perebutan hak teritorial nasional yang menjadi fokus mereka (Fitria and Putra 2022). Wilayah Gaza merupakan bagian dari konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung sejak 1948 tersebut. Wilayah dengan bagian dari Kesultanan Ottoman hingga 1917 ini terletak di antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania yang memiliki panjang 41 km dan lebar 10 km. Kawasan ini pernah menjadi salah satu wilayah padat penduduk tertinggi di dunia, jauh sebelum kegemparan antara Israel dan Palestina tersebut. Negara-negara Eropa yang menang menghalangi pembentukan Kerajaan Arab Bersatu pada Konferensi Perdamaian Paris 1919. Oleh karena itu, Jalur Gaza adalah bagian dari Mandat Inggris atas Palestina, yang telah diratifikasi oleh PBB (BBC News Indonesia 2023).

Israel dan Mesir telah mencapai kesepakatan untuk membatasi pergerakan warga sipil Palestina sejak Gaza berada di bawah kendali Hamas, kelompok militan Palestina, pada tahun 2007. Di sepanjang perbatasan, Israel membangun zona pertahanan untuk melindungi diri dari serangan roket dan serangan dari Hamas. Zona pertahanan membatasi luas lahan yang tersedia untuk pemukiman dan pertanian. Perekonomian Gaza juga berada di ambang kehancuran akibat pembatasan impor dan ekspor. Militer Israel telah menghentikan seluruh pasokan listrik di Jalur Gaza. Sebagian besar rumah hanya mendapat listrik selama tiga jam sehari, sebagian besar listriknya dari Israel, dari pembangkit listrik di Gaza, dan sebagian kecil dari Mesir. Isolasi ini memperburuk kehidupan warga Palestina. Situasi ini memburuk akibat konflik yang semakin intensif dengan Israel (BBC 2023).

Perang Hamas-Israel ini adalah konflik bersenjata berskala besar antara militan Israel dan kelompok militan Palestina tersebut, terutama di dalam dan sekitar Jalur Gaza. Agresi Israel ini berlanjut dalam waktu yang lama, tanpa ada tanda-tanda yang jelas akan berakhir. Pada tahun 2023, tepatnya 7 Oktober konflik kembali memanas ketika Hamas melancarkan serangan tiba-tiba ke Israel Selatan dari Gaza. Bahkan sampai di tahun 2024 Israel mengklaim akan melawan Hamas di Gaza hingga akhir tahun. Maka, tentu saja isu konflik terbaru ini menarik perhatian Indonesia untuk terus mendukung dan memberikan bantuan kepada Palestina (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2023).

Beberapa respon global seperti Amerika Serikat mulai menekan Israel untuk mengubah taktik perangnya dan menjamin perlindungan warga sipil Palestina (Sorongan 2023). Gencatan senjata diserukan oleh Majelis Umum PBB yang

bersifat segara dan berkelanjutan antara Israel dan Hamas, serta menuntut akses bantuan tanpa hambatan ke Jalur Gaza yang terkepung. Selain itu, adanya upaya untuk menuntut pembebasan sandera tanpa syarat (Tim Redaksi CNBC Indonesia 2023). Mesir dan Mauritania ikut merespon perang ini dengan menyerukan pertemuan darurat khusus Majelis Umum PBB hak veto Amerika Serikat dalam resolusi gencatan senjata yang dianggap kegagalan Dewan Keamanan (CNN Indonesia 2023).

Indonesia menyatakan dukungannya untuk menggugat Israel di pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional, sebagai respons atas kekerasan di Gaza (Sorongan 2023). Presiden Indonesia Joko Widodo, menyerukan penyelesaian konflik sesuai dengan parameter PBB, dan mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran dan menahan diri untuk menghindari korban jiwa dan kehancuran lebih besar. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan Brunei dan Malaysia, mengutuk serangan udara Israel di Gaza dan menyerukan diakhirinya konflik (Strangio 2023).

Indonesia memiliki alat diplomasi untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Faktanya, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar dan resmi diakui sebagai negara anggota OKI. Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran strategis dalam menyelesaikan konflik Gaza melalui kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, mengatur bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Kebebasan ini berarti tidak terikat pada politik atau ideologi negara lain. Bersikap proaktif berarti berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kerja

sama internasional, dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain (Masyrofah 2023).

Kebijakan luar negeri suatu negara selalu dipengaruhi oleh kebijakan dalam negerinya sehingga langkah-langkah politik luar negeri yang dirumuskan tidak lepas dari aspek kebijakan dalam negeri. Indonesia berkomitmen kuat terhadap persoalan kedaulatan Palestina yang didasari oleh dua keharusan mulia. Pertama, keharusan nasional dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Kedua, mandat internasional yang menyerukan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik dengan cara damai dan adil. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui *"two state solution"* (Fitri 2024).

Sejak kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia dengan tegas selalu menunjukkan posisi dan perannya dalam mendukung Palestina. Indonesia konsisten memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah dalam konflik Palestina-Israel. Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyerukan pengembalian seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel tanpa syarat serta pengakuan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan negara di tanah airnya, dengan al-Quds as-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kota dan prinsip *"land for peace"* (Dr. Rizkan Zulyadi and Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H. 2022).

Indonesia memutuskan untuk memainkan peran penting dalam merespon perang tersebut. Seperti yang telah dilakukan beberapa kali sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan dan mengecam tindakan Israel

yang dinilainya merupakan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia. Pernyataan diplomatik tersebut diharapkan menjadi bagian dari dorongan internasional untuk gencatan senjata dan solusi untuk perdamaian mengakhiri konflik yang berkepanjangan (Darmawan 2023).

Melihat komitmen Indonesia dalam merespon perang tersebut, menggambarkan pentingnya memahami sejarah dan konflik yang melanda Gaza dalam konteks upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam merespon Palestina-Israel selama Perang Gaza 2023. Maka, penulis ingin mempelajari lebih lanjut dan melakukan penelitian tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merespon perang tersebut. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia dapat membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah Gaza untuk Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Merespon Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel selama Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024.
2. Untuk menjelaskan upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam merespon konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang upaya diplomasi Indonesia dalam merespon konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024. Penulis memilih batasan tahun 2023-2024 karena di periode tersebut terjadi penyerangan yang dilakukan Israel yang menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur penting di Gaza, seperti rumah-rumah, kerugian politik bahkan juga membawa kerugian kepada Israel dalam sektor ekonominya. Bermula dari serangan mendadak Hamas dari Gaza ke Israel Selatan yang dimana penyerangan ini merupakan langkah besar Hamas dalam membangun kekuatannya. Periode waktu penelitian ini dibatasi dengan masa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Serta, respon Indonesia terhadap konflik Perang Gaza ini memiliki peran besar dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina serta aktif pada diplomasi perdamaian di forum-forum internasional dan negara koalisi dengan menunjukkan komitmennya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Konflik yang masih berlanjut tentu saja menarik perhatian para peneliti untuk meneliti pembaruan mengenai isu tersebut. Maka, penulis mencoba untuk mengaitkan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas topik serupa. Berikut beberapa penelitian yang relevan tentang upaya diplomasi Indonesia dalam merespon konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024.

Penelitian oleh Cantikaputri dan Ella (2023) dalam jurnalnya yang berjudul "Parliamentary Diplomacy in Supporting Palestinian Independence Evidence from Indonesia" ini membahas bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menggunakan diplomasi parlemen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yang mencakup pelacakan media, wawancara, dan analisis dokumen resmi. Artikel ini menekankan bahwa Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan betapa pentingnya membantu parlemen menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Dengan pendekatan ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan diplomasi jalur pertama dan diplomasi DPR RI akan menghasilkan diplomasi Indonesia secara keseluruhan (Prihatini 2023). Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dimana jurnal tersebut hanya membahas peran diplomasi parlementer DPR RI dengan kurun waktu tahun 2017-2021, sedangkan penelitian ini membahas lebih luas kepada upaya diplomasi pemerintah Indonesia dengan kurun waktu yang berbeda yaitu 2023-2024.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Asy Syams (2023) pada jurnalnya yang berjudul "Indonesia's Role in the 2023 Palestinian-Israel War : A Diplomatic Perspective". Artikel ini membahas peran diplomasi Indonesia dalam Perang Palestina-Israel tahun 2023. Fokus dari laporan ini adalah advokasi solusi dua negara, partisipasi dalam forum internasional, dan penyediaan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Hal ini menekankan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan di kawasan (Darmawan 2023). Keterkaitan jurnal tersebut dengan penulisan ini adalah topik pembahasan yang sama yaitu perang Palestina-Israel tahun 2023, meskipun serupa artikel tersebut memiliki batas tahun sampai

2023 sedangkan penulisan ini periode tahun 2023-2024 dengan fokus lebih terkini pada upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia membantu Palestina sampai mengecam Israel untuk perdamaian di dunia.

Penelitian ketiga oleh Irfan dan Hafid (2024) yang berjudul "Indonesia's Diplomatic Contribution to the Israel-Palestine Conflict Since 1948", artikel ini membahas tentang upaya diplomasi Indonesia yang konsisten dalam konflik Israel-Palestina sejak tahun 1948. Artikel ini menekankan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, advokasi solusi dua negara, partisipasi aktif dalam forum internasional, dan promosi nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi warga Palestina, mendukung UNRWA, dan mengadvokasi solusi dua negara berdasarkan hukum internasional (Gati and Hafid 2024). Keterkaitan jurnal tersebut pada penulisan ini terletak pada pembahasan tentang kontribusi diplomasi Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel, namun penulisan ini lebih berbeda pada spesifik fokus tahun penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada Perang Gaza 2023 sedangkan jurnal tersebut menjelaskan upaya diplomasi Indonesia pada konflik Palestina-Israel secara umum.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, yaitu penelitian ini melakukan analisis yang lebih khusus dan terkini. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas respon Pemerintah Indonesia dalam upaya diplomasi terhadap konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza 2023 sampai tahun 2024, sehingga topik penelitian ini ditujukan untuk memberikan pembaruan analisis

terhadap upaya diplomasi Indonesia dalam merespon konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza dalam kurun waktu 2023 sampai 2024.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep *Middle Powers. Middle powers* merujuk pada negara-negara yang tidak termasuk dalam kategori kekuatan besar *(great powers)* tetapi memiliki pengaruh signifikan dalam politik internasional. Andrew F. Cooper, Richard A. Higgott, dan Kim Richard Nossal (1993) dalam buku mereka yang berjudul *"Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order".* Pada bab 1 mereka yang berjudul *Leadership, Followership, and Middle Powers in International Politics: A Reappraisal* menggambarkan bahwa middle powers memiliki kemampuan untuk dapat berperan aktif dalam diplomasi multilateral, seringkali melalui pendekatan yang lebih teknis dan inovatif (Cooper, Higgott and Nossal 1993).

Middle powers biasanya diidentifikasi berdasarkan kemampuan diplomatik, ekonomi, dan militer yang cukup, serta komitmen untuk berkontribusi terhadap kerja sama internasional. Negara-negara ini cenderung memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perdebatan global dan sering kali mengambil peran sebagai mediator dalam konflik internasional. Cooper dan kawan-kawan mengidentifikasi beberapa pendekatan untuk mendefinisikan dan memahami middle powers. Pertama, pendekatan hierarkis, pada pendekatan ini *Middle powers* didefinisikan berdasarkan posisi mereka dalam hierarki internasional, sering kali diukur melalui

atribut yang dapat dihitung seperti luas wilayah, populasi, kekuatan ekonomi, dan kemampuan militer.

Kedua, pendekatan geografis, pendekatan ini memiliki dua varian utama. Varian pertama menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki kekuatan lebih signifikan dalam wilayah mereka dapat dianggap sebagai kekuatan menengah. Varian kedua, varian ini diadopsi selama periode Perang Dingin bipolar, menyatakan bahwa kekuatan menengah berada di posisi 'tengah' secara ideologis antara dua kekuatan besar yang terpolarisasi. Ketiga, pendekatan normatif, pada pendekatan ini *middle powers* dianggap memiliki kebijaksanaan atau nilai moral yang lebih tinggi dan dapat dipercaya dalam diplomasi, sering kali berperan dalam menciptakan dan memelihara tatanan global.

Pendekatan keempat yaitu perilaku *middle powers* didefinisikan berdasarkan gaya perilaku diplomatik mereka, seperti kecenderungan untuk mencari solusi multilateral, berkompromi dalam sengketa internasional, dan berperan sebagai "warga negara internasional yang baik." Pendekatan behavioral pada *middle powers* menekankan pentingnya perilaku diplomatik negara-negara menengah dibandingkan dengan karakteristik struktural atau posisi mereka dalam hierarki internasional. Fokus utamanya adalah pada tindakan dan strategi yang diambil oleh *middle powers* dalam konteks diplomasi, termasuk bagaimana mereka berupaya mencapai tujuan politik internasional.

Pada teori ini, *Middle power diplomacy* bergantung pada nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip global, yang sering kali mencakup kombinasi kepentingan internasional dan kepentingan nasional. Negara-negara

dengan kekuatan menengah ini memperkuat dan menstabilkan struktur internasional berusaha menciptakan kondisi yang stabil untuk kepentingan mereka dan negara lain. Negara yang *Middle Power* seringkali menunjukkan perilaku diplomatik yang stabil dan legitimatif terhadap tatanan global dengan sistem politiknya yang stabil dan demokratis, yang memungkinkan partisipasi aktif dalam forum internasional dan menjaga hubungan baik dengan negara lain (Cooper, Higgott and Nossal 1993).

Selain itu, pendekatan perilaku juga didasarkan oleh kepentingan nasional, di mana mereka berupaya mencapai tujuan nasional sambil tetap berkontribusi pada kepentingan global. Pendekatan ini mencerminkan bahwa perilaku diplomatik *middle powers* tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan dalam sistem internasional dan kondisi politik domestik. Dengan demikian, pendekatan behavioral memberikan pemahaman yang lebih dinamis dan pragmatis tentang bagaimana *middle powers* beroperasi dalam konteks internasional, dengan penekanan pada tindakan konkret mereka dalam diplomasi dan koalisi.

Pendekatan perilaku ini menekankan pentingnya tiga pola dalam *middle power* yaitu :

1. *Catalyst*: kekuatan menengah yang inovatif dapat berfungsi sebagai katalis dalam upaya diplomatik, menawarkan energi intelektual dan politik untuk mendorong inisiatif dan, dalam konteks tersebut, memimpin dalam mengumpulkan dukungan dari pihak lain.

2. *Facilitator*: berfokus pada penetapan agenda. Aktor-aktor di sini berfungsi untuk memfasilitasi aktivitas asosiasional, kolaboratif, dan koalisi. Menurut pola ini, koalisi adalah sarana untuk memanfaatkan kekuatan. Aktivitas ini memerlukan perencanaan, penyelenggaraan pertemuan, penetapan prioritas, dan penyusunan.
3. *Manager*: pola ini menekankan pembangunan lembaga. Pembangunan kelembagaan mencakup pembentukan organisasi formal, pengembangan norma, dan konvensi. Inti dari tahap ini adalah program kerja yang menetapkan pembagian tugas, aktivitas pemantauan, dan kemungkinan pembentukan sekretariat. Pola ini juga melibatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, serta menyelesaikan sengketa. Ini dilakukan melalui diplomasi, forum formal dan informal, dan menciptakan transparansi. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan menunjukkan relevansi inisiatif dengan mengimplementasikan proposal yang praktis.

Maka, pada penelitian ini, upaya diplomasi Indonesia dalam merespon agresi israel terhadap Gaza lebih relevan dengan pendekatan perilaku karena Indonesia mengandalkan diplomasi dan kebijakan luar negerinya. Indonesia juga berusaha memberikan kontribusi positif terhadap tatanan internasional dan menunjukkan kepemimpinan melalui inisiatif yang konstruktif. Dari langkah-langkah *middle powers* tersebut penulis akan menganalisis upaya diplomasi pemerintah indonesia dalam merespon agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, pendekatan perilaku yang dilakukan Indonesia dalam *middle power* terlihat melalui beberapa cara. Pertama, Indonesia terlibat aktif dalam berdialog di PBB dan organisasi regional merupakan kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi. Bersama negara-negara OIC dan negara lainnya juga bertindak sebagai mediator antara Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik dan mencapai solusi damai.

Kedua, Indonesia membangun aliansi dengan negara lain yang memiliki nilai dan kepentingan yang sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan negara-negara dan organisasi internasional seperti OIC. Dengan demikian, Indonesia dapat secara efektif mempengaruhi perkembangan penyelesaian konflik dan meningkatkan kerja sama internasional.

Ketiga, Indonesia berfokus pada pembangunan lembaga melalui pembentukan organisasi formal, pengembangan norma, dan konvensi, serta langkah-langkah yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, mendorong pembentukan norma-norma internasional yang menjamin perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yaitu metode deskripsi untuk menjelaskan bagaimana sikap dan upaya diplomasi

Pemerintah Indonesia dalam merespon Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024. Melalui *middle powers* sebagai teori untuk menganalisis upaya yang telah dilalukan oleh Indonesia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia, yang khususnya Kementerian Luar Negeri dan aktor lain yang terkait dalam menjalankan diplomasi. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah respon terhadap agresi Israel ke Gaza.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis, data yang penulis dapatkan saat kuliah terbuka dengan Menlu secara online, website resmi, dan pidato presiden. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Metode ini data dikumpulkan melalui berita dan literatur seperti artikel, laporan, dan jurnal yang mengandung fakta yang terkait, termasuk sumber berita di internet.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur dan berita yang terpercaya, seperti website resmi, jurnal dan kajian literatur lainnya. Data-data tersebut penulis diteliti sehingga dianggap relevan dengan topik penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk sub-bab agar dapat mudah dipahami. Bagian terakhir, akan penulis tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun melalui empat bab utama, pada bagian bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab 2, menjelaskan bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel selama Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024. Serta apa saja upaya diplomasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merespon konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024 tersebut.

Selanjutnya, bab 3 berisi tentang indonesia sebagai *middle power* dan bagaimana implikasi upaya kebijakan indonesia dalam diplomasinya merespon agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024 berdasarkan konsep *middle powers.* Terakhir, bab 4 adalah bagian penutup yaitu kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan di bab 1, bab 2, dan bab 3.

BAB 2

AGRESI ISRAEL TERHADAP GAZA PADA TAHUN 2023-2024 DAN RESPON INDONESIA

Sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel masih konsisten meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan tegas mengecam kekerasan Israel terhadap warga Gaza. Indonesia mendorong penghentian kekerasan dan kembalinya negosiasi damai di berbagai forum internasional, seperti ASEAN, Pertemuan Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) serta Sidang Dewan Keamanan PBB. Untuk memperkuat posisi dalam internasional Indonesia menyelesaikan konflik ini melalui menteri-menteri Indonesia, khususnya Menteri Luar Negeri yang aktif berkomunikasi dengan beberapa negara dan forum-forum internasional. Bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab untuk memudahkan menjelaskan sikap pemerintah Indonesia dalam upaya diplomasinya yang telah dilakukan dalam merespon konflik Palestina-Israel pada Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024.

2.1 Agresi Militer Israel di Gaza tahun 2023-2024

Agresi ini semakin memanas setelah serangan mendadak oleh kelompok Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan terjadinya eskalasi besar-besaran. Agresi militer ini menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan Israel merespons dengan serangan udara yang intens di Gaza. Agresi militer ini menyebabkan ribuan

korban jiwa dan luka-luka, menghancurkan infrastruktur, dan membuat krisis kemanusiaan semakin parah.

Israel terus melakukan upaya strategis yang sistematis yaitu pertama, persoalan tanah Palestina yang kian menyempit, mulai dari pengusiran paksa dan pembunuhan terhadap penduduknya. Lembaga-lembaga yang mengurus pengungsi, seperti organisasi UNRWA, semakin dilemahkan oleh keinginan Israel untuk memastikan bahwa para pengungsi tidak kembali ke tanah air mereka. Selain itu, Israel juga mengalihkan fokus dan tujuan *two state solution* menjadi bukan *the only solution.* Negara Palestina terus ditolak keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel dan negara-negara yang di pihaknya terus melakukan penekanan lobby kepada negara-negara musuh, di mana pendekatan ini diambil untuk menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel. Upaya strategis Israel yang sistematis ini menjadikan gaza tempat yang tidak layak ditinggali karena 70% infrastrukturnya sudah tidak berfungsi (UGM 2024).

Serangan Israel pada tahun 2023 termasuk dalam konteks operasi yang diluncurkan oleh Hamas, yang dikenal dengan nama *"Al-Aqsa Flood".* Operasi ini menarik perhatian dunia karena koordinasi dan keberanian yang luar biasa, di mana Hamas melakukan serangan melainkan pada pagi hari tidak malam hari. Alih-alih menggunakan banyak terowongan di bawah Gaza untuk menyerang Israel, mereka hanya berkendara ke sana, terjun payung, tiba melalui laut atau seringkali berjalan kaki melintasi perbatasan (Baroud 2023). Panglima militer Hamas, Brigade Al Qassam, Mohammed Deif, mengumumkan dalam video bahwa ia bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

memberikan pernyataan bahwa "*Israel is at War"* sebagai respon untuk pernyataan panglima militer Hamas tersebut (Hutchinson 2023).

Melanjutkan tanggapannya tersebut, di hari yang sama pada 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan udara dan darat dengan skala besar di Gaza, yang telah menewaskan ribuan orang dan mengungsi sekitar 1,5 juta penduduk (Diakonia 2023). Konflik ini menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur penting di Gaza, termasuk rumah-rumah dan fasilitas publik, serta berdampak negatif pada sektor politik dan ekonomi Israel. Pengepungan yang berkepanjangan menciptakan krisis kemanusiaan yang serius, di mana penduduk mengalami kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan. Situasi ini terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berakhir (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2023).

Militer Israel dikritik karena mengabaikan aturan hukum internasional dan melakukan serangan tanpa pandang bulu, yang mengakibatkan tingginya jumlah korban sipil. Dalam beberapa minggu, lebih dari 10.000 orang telah tewas, ribuan lainnya terluka, dan lebih dari satu juta orang mengungsi. Banyak blok perumahan, tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah hancur, termasuk yang berfungsi sebagai tempat penampungan (Diakonia 2023). Serangan yang tidak membedakan antara warga sipil dan objek sipil ini melanggar prinsip proporsionalitas. Israel gagal membedakan antara warga sipil dan objek sipil di satu sisi dan sasaran militer di sisi lain. Israel memberikan "peringatan" kepada penduduk Gaza utara untuk pindah ke selatan, tetapi banyak yang menjadi korban serangan saat berusaha mengungsi, serta menempatkan warga sipil dalam bahaya yang lebih besar.

Warga di utara Gaza terpaksa mengungsi ke selatan akibat tekanan dari Israel tersebut. Beberapa dari mereka yang diusir mengalami serangan bom brutal saat berada di kendaraan pengungsian. Media Palestina melaporkan sejumlah serangan udara Israel di jalan utama yang menghubungkan utara dan selatan Gaza mengakibatkan banyak kematian, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi korban saat berusaha mengungsi sesuai dengan instruksi militer Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa tiga serangan udara di jalan raya telah mengakibatkan setidaknya 70 kematian, dengan serangan terbaru merenggut nyawa minimal 40 orang pada September 2023. Dampak lainnya dari serangan tersebut adalah ada delapan rumah sakit di Gaza yang kekurangan obat-obatan dan peralatan medis (Zamzami 2024).

Pada 24 November 2023, terjadi "*humanitarian pause"* atau jeda kemanusiaan yang dimana empat hari selama jeda kemanusiaan tersebut berlangsung ada 51 sandera Israel dan 18 sandera asing, termasuk wanita dan anak-anak, dibebaskan setelah ditahan di Gaza sejak penculikan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Pada saat yang sama, 150 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, juga dibebaskan dari penjara Israel (UNSCO 2023). Jeda ini memungkinkan PBB dan mitranya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk wilayah utara, meskipun situasi kemanusiaan tetap kritis dan memerlukan bantuan yang mendesak dan berkelanjutan untuk meringankan penderitaan penduduk. Sekretaris Jenderal PBB mengulangi seruannya untuk gencatan senjata kemanusiaan penuh demi kepentingan rakyat Gaza, Israel, dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Hingga awal Oktober 2024, kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza melaporkan bahwa 26 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah masjid dan sekolah yang menampung pengungsi Palestina di Gaza. Serangan tersebut terjadi di Deir al-Balah, dengan puluhan orang juga mengalami luka-luka. Di utara Gaza, pasukan Israel mengelilingi area Jabalia, mereka menyatakan bahwa serangan tersebut ditargetkan kepada militan Hamas yang beroperasi di pusat-pusat komando di lokasi tersebut. Serangan ini terjadi hampir setahun setelah serangan oleh Hamas yang mengakibatkan sekitar 1.200 kematian di Israel (Phillips 2024).

Sejak saat itu, lebih dari 41.000 warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza. Israel mengklaim bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko terhadap warga sipil. IDF *(Israel Defense Forces)* juga melaporkan telah melakukan serangan udara di sekolah lain di utara Gaza, yang dikatakan digunakan sebagai pusat komando Hamas. Sementara itu, IDF juga tidak memberikan izin akses bagi jurnalis internasional ke Gaza sehingga menyulitkan verifikasi informasi di lapangan. Israel bertekad untuk menumpas Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, setelah serangan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang tersebut. Sejak itu, Israel melancarkan serangan udara, pengepungan, dan invasi darat, dengan otoritas kesehatan Palestina melaporkan jumlah korban tewas di Gaza telah melebihi 10.000 orang (UGM 2024).

Situasi yang semakin memburuk di tahun 2024 ini, semakin banyak tuduhan pula yang dilakukan Israel. UNRWA diperlemah sistematisnya, banyak negara terutama dari Amerika Serikat berhenti menyalurkan dana atau bantuan

kemanusiaan kepada UNRWA akibat adanya tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober 2023 tersebut. Di titik itulah, Retno Marsudi selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, memulai perjalanan diplomasinya ke negara-negara Eropa. Meyakinkan negara-negara tersebut untuk tidak melakukan pembekuan bantuan sebelum ada hasil dari investigasi yang dilakukan PBB. Dan ternyata setelah di investigasi, tuduhan tersebut tidak terbukti. Maka beberapa negara kembali melanjutkan pendanaannya kepada UNRWA. Secara sistematis dan strategis pelemahan sistematis terhadap UNRWA ini dilakukan Israel untuk menghapus isu pengungsi, sehingga *right to return* ditiadakan. Namun, setelah kembalinya bantuan, UNRWA kembali membantu para pengungsi sejumlah 5,9 juta orang pengungsi di Palestina (UGM 2024).

2.2 Respon Internasional (Negara, NGos, Org. Internasional)

Agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023 hingga 2024 memicu respon internasional yang beragam, melibatkan negara-negara, organisasi non-pemerintah (NGO), dan organisasi internasional lainnya. Respon ini mencakup seruan untuk menghentikan kekerasan, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional. Namun, terdapat pula dukungan signifikan terhadap Israel.

Dukungan tersebut terutama datang dari negara-negara Barat. Pada 9 Oktober 2023, hanya dua hari setelah serangan Hamas, sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Macron dari Prancis, Kanselir Scholz dari Jerman, Perdana Menteri Meloni dari Italia, Perdana Menteri Sunak dari Inggris, dan Presiden Biden dari Amerika Serikat, menyatakan dukungan kuat terhadap Israel. Mereka mengecam keras tindakan Hamas, menggambarkannya sebagai terorisme yang

tidak dapat dibenarkan dan tidak manusiawi, serta menyoroti kekejaman yang terjadi, seperti pembantaian dan penculikan.

Para pemimpin ini menegaskan komitmen mereka untuk mendukung hak Israel dalam membela diri dari terorisme, sambil mengakui aspirasi sah rakyat Palestina untuk keadilan dan kebebasan. Mereka menekankan bahwa Hamas tidak mewakili aspirasi ini dan hanya membawa lebih banyak kekerasan. Pernyataan tersebut diakhiri dengan komitmen untuk terkoordinasi dan bersatu sebagai sekutu, dengan tujuan memastikan keamanan Israel dan menciptakan Timur Tengah yang damai (The White House 2023). Sebagai bagian dari dukungan ini, pemerintah Biden dilaporkan mengizinkan penjualan darurat amunisi dan peralatan militer ke Israel tanpa berkonsultasi dengan Kongres (Lee 2023).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, memberikan respon yang berbeda dengan memperingatkan bahwa situasi di Gaza semakin memburuk, menyebutnya sebagai "*Gaza is becoming a graveyard for children*." Ia menekankan bahwa Gaza telah menjadi "tempat kematian dan keputusasaan," dan mendesak semua pihak untuk menghentikan konflik serta menghormati hukum humaniter internasional. Guterres menyerukan gencatan senjata segera, mengingat pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi. Ia juga menyatakan bahwa PBB membutuhkan $1,2 miliar untuk memberikan bantuan kepada 2,7 juta orang di Gaza dan Tepi Barat (Nichols 2023).

Dalam upaya internasional untuk membebaskan sandera setelah serangan udara Israel, Qatar berperan sebagai mediator utama, bekerja sama dengan Israel untuk mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza. Namun, pada minggu-minggu awal

perang, Qatar hanya berhasil menegosiasikan pembebasan empat orang yang ditahan oleh Hamas (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2023).

Negara-negara lain juga menunjukkan respon kemanusiaan. Italia, misalnya, mengirimkan kapal rumah sakit ke perairan lepas pantai Gaza untuk merawat korban konflik Israel-Hamas. Kapal tersebut membawa 170 staf medis, termasuk 30 yang terlatih dalam situasi darurat, dan berangkat dari Pelabuhan Civitavecchia pada 8 November. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, juga menyatakan bahwa Italia berupaya mengirimkan rumah sakit lapangan ke Gaza, di mana korban yang terluka akan dirawat sebelum dikembalikan ke Gaza (DW 2023).

Mesir dan Mauritania juga ikut merespon perang ini dengan menyerukan pertemuan darurat khusus Majelis Umum PBB hak veto Amerika Serikat dalam resolusi gencatan senjata yang dianggap kegagalan Dewan Keamanan. Pada 12 Desember 2023, Majelis Umum PBB mengadakan rapat darurat untuk membahas keadaan di Jalur Gaza. Mesir dan Mauritania memanfaatkan Resolusi UNGA 377 tersebut untuk meminta pertemuan darurat, menyatakan bahwa situasi di Gaza semakin memburuk karena banyaknya pelanggaran hukum internasional, sebagai tanggapan atas veto AS yang menggagalkan resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB. Lebih dari 18 ribu orang telah tewas di Palestina sejak awal konflik, termasuk banyak anak perempuan dan anak-anak. Ada kemungkinan bahwa rapat tersebut akan berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu New York (CNN Indonesia 2023).

Belanda pun mengirimkan kapal militernya ke Siprus untuk membantu operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Belanda, Kajsa Ollongren, mengungkapkan bahwa kapal ini juga dapat digunakan untuk evakuasi

dan membawa pasokan medis ke Jalur Gaza. Guterres juga mengungkapkan keprihatinan mengenai jumlah korban pekerja bantuan PBB di Gaza, yang mencapai 89 orang, tertinggi dalam sejarah UNRWA. Meskipun bantuan telah dikirim dari Mesir melalui penyeberangan Rafah, pejabat PBB menyatakan bahwa jumlah ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2,3 juta penduduk Gaza, di mana lebih dari satu juta di antaranya telah kehilangan tempat tinggal akibat pemboman Israel (Nichols 2023).

Badan-badan hak asasi manusia, seperti ICRC dan Komisaris Tinggi PBB, turut menyuarakan keprihatinan serius mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Mereka menyerukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh kedua belah pihak dan menekankan perlunya melindungi warga sipil sesuai hukum humaniter internasional. Uni Eropa juga menekankan hak Israel untuk membela diri, sembari menyerukan perlindungan warga sipil. Beberapa negara lainnya, termasuk Norwegia dan Chili, mengkritik tindakan militer Israel sebagai tidak proporsional dan mendesak untuk diadakannya jeda kemanusiaan serta penyelidikan atas pelanggaran hukum internasional.

Bahkan Afrika Selatan menarik duta besar mereka atau memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, Afrika Selatan memulai proses hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional karena pelanggaran Konvensi Genosida. Selain itu, di balik dukungan militer Amerika terhadap Israel, juga ada upaya untuk mendukung gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diambil oleh Hamas. Amerika Serikat mulai mendesak Israel untuk mengubah taktik perangnya dan menjamin perlindungan bagi warga sipil Palestina (Sorongan 2023).

Amnesty International juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pemerintah Israel dituduh menerapkan kebijakan yang menyebabkan pemindahan paksa dan segregasi, dengan aksi militer yang sering kali gagal membedakan antara kombatan dan warga sipil. Hal ini mengakibatkan banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang meluas, serta kritik terhadap sistem hukum Israel yang dianggap gagal melindungi hak-hak warga Palestina (Amnesty International 2024).

Organisasi non-pemerintah (NGO) yang beroperasi di Gaza melaporkan bahwa penghalangan sistematis Israel terhadap bantuan dan serangan berkelanjutan terhadap operasi bantuan telah menghambat pengiriman yang efektif kepada mereka yang membutuhkan. Sejak menteri pertahanan Israel, Gallant, mengumumkan pengepungan total di Jalur Gaza pada 9 Oktober 2023, jumlah bantuan yang masuk ke daerah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. NGO menuntut gencatan senjata segera untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan melindungi kehidupan di Gaza, serta menekankan perlunya lingkungan yang aman untuk pengiriman bantuan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (Care International 2024).

2.3 Kebijakan Indonesia terhadap isu Gaza, Palestina

Dinamika dukungan Indonesia terhadap Palestina berakar pada beberapa prinsip dan nilai dasar yang mencerminkan sikap politik luar negeri yang konsisten lintas pemerintahan. Indonesia telah lama mengakui dan mendukung perjuangan Palestina. Pada tahun 1974, Indonesia mengakui PLO *(Palestine Leberation*

Organization) sebagai representatif masyarakat Palestina. Setelah Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November 1988, Indonesia segera mengakui kemerdekaan tersebut dan menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina pada 16 November. Indonesia menolak untuk menjalin hubungan dengan Israel selama Palestina masih dijajah. Pada tahun 1991, kantor Kedutaan Besar Palestina dibuka di Jakarta, dan pada tahun 1993, Yasser Arafat mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Dalam praktik politik luar negerinya, Indonesia dipandu oleh prinsip "bebas-aktif," yang mendorong partisipasi aktif dalam forum internasional seperti PBB dan OKI. Indonesia berupaya menggalang dukungan bagi Palestina dan mendorong solusi diplomatik, termasuk resolusi gencatan senjata dan negosiasi perdamaian. Prinsip ini menjadi semangat perjuangan Indonesia untuk memperkuat perannya di kancah internasional, terutama dalam mendukung hak kemerdekaan Palestina (Satris 2019).

Jika diurutkan pada kepresidenan Indonesia dinamika dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara yaitu, pada era Soekarno, Indonesia menampilkan solidaritas yang kuat dengan gerakan anti-kolonialisme global, termasuk perjuangan Palestina, dan menjadi salah satu pendukung awal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Fokus utama pada masa ini adalah kemerdekaan Palestina secara penuh, tanpa penekanan spesifik pada solusi dua negara (Masyrofah 2023).

Memasuki era Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia beralih menjadi lebih pragmatis dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Meskipun dukungan terhadap Palestina tetap ada, pendekatan yang diambil menjadi lebih hati-hati. Pada

periode ini, dukungan terhadap solusi dua negara mulai muncul sejalan dengan perkembangan di tingkat internasional, di mana Indonesia berperan aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperjuangkan hak-hak Palestina.

Dengan transisi ke era Reformasi, di bawah kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Indonesia mengalami kebebasan lebih besar dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Dukungan terhadap solusi dua negara menjadi semakin kuat dan eksplisit, dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional untuk mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel.

Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, diplomasi Indonesia menjadi lebih proaktif. SBY secara terbuka menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara, serta menawarkan bantuan pembangunan kapasitas kepada Palestina. Era Joko Widodo melanjutkan konsistensi dukungan terhadap Palestina dan solusi dua negara, dengan penekanan pada isu kemanusiaan di Gaza akibat blokade. Indonesia terus memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan politik kepada Palestina, serta menjadi tuan rumah berbagai forum dan konferensi internasional untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan Palestina (Masyrofah 2023).

Nilai dasar yang mencerminkan sikap politik luar negeri yang konsisten tersebut adalah pertama, anti-kolonialisme yang sangat kuat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, Indonesia dengan tegas menentang segala bentuk pendudukan dan penindasan suatu bangsa oleh bangsa lain. Sikap ini sejalan dengan UUD 1945, yang menolak penjajahan di atas dunia; Indonesia memandang pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai

pelanggaran terhadap hak dan kedaulatan Palestina. Indonesia terhadap Palestina juga memiliki rasa solidaritas yang sangat kuat sebagai sesama bekas jajahan. Kedua, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Palestina, merasa memiliki kewajiban moral untuk mendukung perjuangan mereka, terutama karena Palestina termasuk di antara negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia (Satris 2019).

Ketiga, kemanusiaan. Konsisten dalam bantuan kemanusiaan Indonesia ditunjukkan dengan mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Fasilitas kemanusiaan ini didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga Palestina. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini didanai penuh oleh masyarakat Indonesia dan organisasi kemanusiaan *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C). Rumah Sakit Indonesia ini dikelola oleh otoritas Palestina, namun relawan dari Indonesia tetap terlibat dalam operasionalnya dibawah pengawasan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Maka, Indonesia sebagai negara menengah melalui rumah sakit ini menunjukkan dukungan yang bersifat berkelanjutan terhadap Palestina (The Jakarta Post 2023). Indonesia juga telah memberikan lebih dari 4.500 ton bantuan kemanusiaan, disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan, sebagai bukti komitmennya terhadap kemanusiaan dengan meningkatkan kontribusi dan mendukung operasi UNRWA.

Keempat, perdamaian dunia. Indonesia secara konsisten mendukung solusi "two-state" dalam konflik Palestina-Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya pengakuan kemerdekaan Palestina dalam penyelesaian konflik yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun ini. Ia menyebutkan bahwa

meskipun ada pernyataan dari pejabat Israel yang meragukan keberadaan solusi ini, Indonesia tetap menganggapnya sebagai keharusan. Indonesia juga terus mendorong gencatan senjata permanen, perlindungan warga sipil, dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Retno mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, mencerminkan keinginan rakyat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan resolusi damai yaitu mengadvokasi *"two state solution"* memungkinkan warga Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati hak asasi manusia (Fachri 2024).

Kelima, **s**tabilitas politik dalam negeri. Isu konflik Palestina menarik perhatian masyarakat internasional, terutama umat Muslim, termasuk di Indonesia. Pemerintah melihat isu ini sebagai peluang untuk mendapatkan simpati publik, sehingga opini publik harus dipertimbangkan dalam kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia secara resmi melarang pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No.3 Tahun 2019, yang menegaskan tidak adanya hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Aturan ini melarang penggunaan bendera, lambang, dan atribut Israel di wilayah Indonesia (Wahyuni 2023). Kebijakan ini berimplikasi pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, terutama pada negara yang memiliki hubungan baik dengan Israel. Meskipun indonesia mendapatkan tawaran dari negara-negara seperti Amerika Serikat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan imbalan bantuan ekonomi dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, menekankan bahwa posisi Indonesia tetap

kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dengan membantah pernyataan bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar dapat bergabung dengan organisasi tersebut (Wiyoga 2024).

Keenam, Indonesia juga mendukung negara palestina berdasarkan nilai-nilai universal. Untuk tetap konsisten dengan prinsip ini bukan hal yang mudah, bahkan sangat sulit bagi sebuah negara untuk melakukannya, terutama di tengah kondisi global yang penuh dengan tekanan dan upaya lobi transaksi yang beragam. Namun, pemerintah Indonesia tetap teguh dan konsisten dalam membela Palestina, yang membuat Indonesia dihormati oleh dunia internasional. Indonesia adalah satu-satunya negara non-arab yang bergabung dengan Uni Eropa saat pertemuan Brussel terjadi. Di antara tujuh negara yang diberi mandat oleh OIC, Indonesia adalah negara perwakilan Asia. Ini menunjukkan kinerja diplomasi dan kekuatan posisinya sebagai negara *middle power* (UGM 2024).

Pada Juni 2023, 144 dari 193 negara anggota PBB mengakui Palestina; Norwegia, Irlandia, dan Spanyol adalah negara yang paling baru mengakuinya. Sebanyak 49 negara yang belum mengakui yang mana sebagian besarnya adalah 28 negara-negara Barat dan Eropa. Indonesia mengakui Palestina pada tahun 1988 bersama lebih dari 80 negara lainnya. Menlu Retno menyatakan bahwa tujuan beliau adalah melakukan apa yang diperlukan untuk mempertimbangkan pengakuan palestina sesegera mungkin. Negara-negara Eropa yang mengakui akan memberikan pesan kuat bahwa mereka mendukung keadilan dan perdamaian dan bahwa mereka sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah dua negara. Selain tiga negara Eropa tersebut, pemerintah Slovenia juga mengumumkan pengakuan

terhadap palestina pada 30 Mei, namun belum mendapatkan persetujuan dari parlemen saat itu.

Bahkan, Menlu RI dan wakilnya tidak segan dan dengan tegas melakukan aksi *walkout* untuk bentuk protes dan boikot akan pidato dari Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Setahun setelah konflik Israel-Hamas pecah di Gaza, situasi masih kritis dengan banyak korban jiwa. Indonesia, meskipun jauh dari lokasi konflik, telah berusaha melalui diplomasi untuk mendukung perdamaian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya tindakan diplomatik Indonesia di forum internasional, termasuk *walkout* saat pidato Perdana Menteri Israel tersebut, untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Tindakan tersebut jelas tercatat di dunia internasional sebagai bentuk pembelaan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Kontribusi Indonesia yaitu dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan diplomasi, cukup signifikan mengingat keterbatasan yang ada, namun Indonesia menghadapi tantangan karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yang dimana tantangan itu membatasi peran aktifnya (Dwiastono 2024).

Sedangkan, di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo, dalam KTT, meminta agar semua negara besar memanfaatkan kekuatan mereka untuk menegakkan hukum internasional. Dengan mendukung usulan gencatan senjata langsung di Gaza dari Presiden AS Joe Biden, Indonesia siap mendukung setiap upaya yang menghasilkan gencatan senjata. Dalam KTT, Menhan Prabowo menekankan empat poin utama: pertama, meningkatkan kontribusi kepada UNRWA; kedua, mengirimkan lebih banyak rumah sakit lapangan dan tim medis ke Gaza dan siap mengirim kapal rumah sakit dan bantuan udara jika diperlukan; ketiga, menerima hingga 1.000 pasien Gaza untuk perawatan di Indonesia, serta

memulangkan mereka setelah sembuh dan situasi di Gaza normal; keempat, Indonesia bersedia memberikan pendidikan dan perawatan pasca trauma kepada anak-anak di Gaza, dan mereka akan dikembalikan saat keadaan kembali stabil. Namun, Indonesia tetap pada keyakinannya bahwa solusi terakhir untuk masalah ini adalah two-state solution. Masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan solusi di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara aman dan damai (Kemenhan RI 2024).

BAB 3

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERESPON AGRESI ISRAEL TERHADAP GAZA TAHUN 2023-2024

Indonesia dikenal sebagai *middle state* karena posisinya yang strategis dan selalu aktif berpartisipasi dalam hubungan internasional. Posisinya sebagai *middle power*, memungkinkan indonesia untuk aktif terlibat secara konstruktif dalam isu-isu global, memanfaatkan hubungan diplomatiknya untuk mendorong kerjasama dan dialog antarnegara. Dengan kebijakan luar negeri indonesia yang berpegang pada prinsip "bebas aktif" menggarisbawahi komitmennya terhadap kemandiriannya sehingga dapat konsisten dalam merespon isu internasional tanpa memihak negara manapun dengan fokus mempromosikan perdamaian dunia. Sehingga indonesia sudah cukup baik memainkan perannya sebagai negara *middle power* (Wuryasti 2024).

Negara indonesia berdampingan dengan negara korea selatan yang memiliki status negara dengan kekuatan menengah atau disebut *middle power nation.* Indonesia sebagai negara *middle power* aktif berpartisipasi dalam forum multilateral untuk meningkatkan pengaruh diplomasinya agar lebih signifikan di kancah internasional, tidak hanya di sektor ekonominya namun juga di sektor politiknya dalam mendukung dan merespon permasalahan yang ada di dunia (Wuryasti 2024). Lembaga *think tank* Australia Lowy Institute, menyebutkan Indonesia merupakan negara kekuatan menengah di kawasan Asia dengan pengaruh diplomasinya yang terus meningkat pesat. Indonesia juga termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami peningkatan kekuatan yang komprehensif. Sehingga

suara Indonesia lebih didengarkan oleh dunia, dapat dilihat dari indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah agenda pertemuan internasional (Nugraheny and Setuningsih 2023).

3.1 Catalyst

Pada pola Catalyst dalam teori *middle powers*, kekuatan menengah yang inovatif dapat berfungsi sebagai katalis dalam upaya diplomatik, menawarkan energi intelektual dan politik untuk mendorong inisiatif dan, dalam konteks tersebut, memimpin dalam mengumpulkan dukungan dari pihak lain (Cooper, Higgott and Nossal 1993).

Konsep ini berfokus pada kemampuan negara-negara menengah untuk bernegosiasi dan bertindak sebagai mediator dalam konflik global. Indikator utama dari pendekatan ini termasuk kemampuan untuk bernegosiasi, di mana negara menengah memiliki kemampuan untuk mencari solusi damai dan menjembatani pihak-pihak yang berkonflik. Kemampuan diplomasi untuk mengumpulkan suara meningkatkan kesadaran tentang masalah internasional, sangat penting untuk mendapatkan dukungan global. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi internasional dan memicu inisiatif merupakan komponen penting dari keterampilan diplomatik. Negara-negara menengah dapat meningkatkan diplomasi global dan membantu stabilitas dan keamanan internasional dengan menggunakan indikator-indikator ini (Cooper, Higgott and Nossal 1993).

Aplikasi ulang pendekatan ini pada Indonesia adalah Indonesia mampu menerapkan kemampuan diplomatiknya yang aktif menyuarakan isu Gaza. Seperti keterlibatan aktif dalam berdialog di PBB dan organisasi regional merupakan

kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi. Bersama negara-negara OIC dan negara lainnya juga bertindak sebagai mediator antara Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik dan mencapai solusi damai.. Di sana, Indonesia dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil dan mendukung resolusi yang mendukung keamanan dan stabilitas di Gaza. Dengan menggunakan kemampuan diplomatik, selain dapat membantu penyelesaian konflik di Gaza, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara menengah yang kuat di dunia internasional.

Pada pola capitalyst kemampuan diplomatiknya indonesia telah banyak menghadiri forum-forum internasional dan berkomunikasi, berinteraksi, dan berargumen di setiap pertemuan-pertemuan tersebut. Seperti Indonesia aktif berdiplomasi dengan negara-negara Timur Tengah. Salah satunya memperkuat komitmennya dengan Turki untuk mendukung Palestina di tengah konflik Gaza yang berlanjut pada 2023-2024 ini. Komitmen ini diperkuat dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 11 November 2023 dalam pertemuan KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Riyadh. Kedua negara ini membahas penekanan *two state solution* sebagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik dan peningkatan kerja sama bilateral melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA) yang ditargetkan selesai pada 2024 (Satpres 2023). Turki berkomitmen memberikan lebih dari 45.000 ton bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan pasokan medis, sebagai respons terhadap kekerasan di Gaza (Katriana and Rahman 2024).

Kemudian, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan Brunei dan Malaysia untuk mengutuk serangan udara Israel di Gaza dan

menyerukan diakhirinya konflik (Strangio 2023). Presiden Joko Widodo konsisten menggunakan kemampuan diplomatiknya untuk merespon isu konflik Gaza. Presiden Joko Widodo sendiri pernah berdialog secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada November 2023. Mereka membahas pentingnya gencatan senjata di Jalur Gaza dengan menekankan *two state solution*. Namun, di kesempatan tersebut Joe Biden tidak memberikan tanggapannya (BBC 2023).

Selanjutnya, pada 23 Februari 2024 di Den Haag kemarin, Indonesia telah menyampaikan pernyataan lisan *(oral proceeding)* di depan Mahkamah Internasional mengenai Palestina. Pernyataan lisan ini menjadi masukan untuk Mahkamah Internasional (MI) dalam membuat *advisory opinion* tentang kebijakan dan tindakan Israel yang melanggar hukum internasional terhadap Palestina, seperti yang diminta oleh Resolusi Nomor 77/247 oleh Majelis Umum PBB (Fitri 2024).

Tidak sampai disitu, Indonesia terus mendukung keputusan *International Court of Justice* (ICJ) agar Israel mematuhinya. ICJ tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan keputusan; Dewan Keamanan PBB yang memiliki kekuatan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, Indonesia terus berbicara dengan DK PBB untuk menggunakan kekuatan menerapkannya agar Israel patuh pada keputusan ICJ, membuat lebih banyak negara mengakui Palestina dan mendorong agar Palestina segera menjadi anggota PBB. Pada pertemuan di Brussels, semua pihak mencapai konsensus bahwa Israel harus memenuhi perintah ICJ, termasuk menghentikan setiap tindakan agresif di Gaza (UGM 2024).

Selain Turki, Indonesia juga terlibat dalam diskusi dengan kekuatan regional seperti Mesir dan Qatar dalam mediasi antara Hamas dan Israel. Diskusi ini dibuka dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi jalan

menuju perdamaian dengan memastikan kebutuhan kemanusiaan juga terpenuhi. Indonesia merespons situasi kemanusiaan di Gaza dengan mendesak kedua belah pihak untuk menunjukkan komitmen dan fleksibilitas dalam perundingan tersebut. Indonesia secara konsisten menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk mendesak gencatan senjata antara Hamas dan Israel, termasuk upaya mengumpulkan dukungan dalam forum internasional seperti Majelis Umum PBB (Roza 2024).

Indonesia terus memperluas kekuatannya dengan melakukan diplomasi kepada negara Selandia Baru. Kedua negara ini sepakat untuk mendukung gencatan senjata di Palestina dalam upaya mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Dalam pertemuannya, Indonesia oleh Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden saat itu dengan Perdana Menteri Selandia Baru yaitu Chris Hipkins, mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlunya bantuan kemanusiaan segera dan berkelanjutan untuk rakyat Gaza, Palestina. Mereka mendukung penyelesaian damai melalui diplomasi dan dialog ini untuk menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Kesepakatan ini mencerminkan solidaritas kedua negara terhadap isu kemanusiaan di kawasan tersebut (Wapres RI 2024).

Keberhasilan diplomasi pemerintah Indonesia lainnya adalah kolaborasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan negara Yordania. Diplomasi ini dilakukan oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan saat itu dengan Raja Yordania Abdullah II yang memang sudah berhubungan baik sejak lama. Kerja sama dengan Yordania dalam pengiriman bantuan via udara ini memperkuat

hubungan bilateral dan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi sebagai *middle power* untuk berkoordinasi dengan negara lain dalam misi kemanusiaan. Keberhasilan ini juga mencerminkan dukungan diplomatik yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan, yang dapat berkontribusi pada posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap isu-isu global (Kemhan 2024).

Melalui diplomasi parlemennya juga indonesia mendorong dukungan terhadap keamanan dan kemerdekaan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Indonesia berpartisipasi aktif dalam mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Pada Mei 2024, resolusi ini tercatat sebanyak 146 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kedaulatan Negara Palestina, yang secara resmi dideklarasikan oleh *Palestine Liberation Organization* (PLO), ini menunjukan adanya solidaritas internasional terhadap Palestina (Dwiastono 2024).

Indonesia terus mendorong Israel untuk bertanggung jawab di forum internasional dan secara resmi mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina. Indonesia membuat pernyataan 27 publik melalui sosial media X pada tanggal 26 Mei 2024 yang mendukung keputusan ICJ yang meminta Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah dan memastikan akses terbuka ke Jalur Gaza bagi komisi pencari fakta atau badan investigasi lainnya untuk menyelidiki tuduhan genosida. Selain itu, Indonesia secara konsisten meminta semua pihak yang terlibat untuk menghentikan genosida yang lebih lanjut di Gaza. Ini dilakukan di berbagai forum, seperti Dewan

Hak Asasi Manusia, dan saat berbicara dengan Komisaris Tinggi dan Pelapor Khusus pada Occupied Palestinian Territory (OPT).

Menteri Pertahanan, Prabowo tidak berhenti menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan solusi nyata untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Ia menyatakan bahwa dukungan terhadap hak-hak Palestina adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional. Pernyataan tersebut beliau tegaskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan oleh Yordania, Mesir, dan PBB mengenai isu Palestina. Dalam pidatonya, Prabowo menyerukan kepada negara-negara besar untuk menggunakan *power* dan pengaruhnya untuk menegakkan hukum internasional, seperti negara Amerika Serikat yang pada proposalnya oleh Joe Biden untuk gencatan senjata segera di Gaza. Sehingga negara-negara anggota lainnya dapat bersatu dalam mendukung Palestina dan menekankan pentingnya dialog serta negosiasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Kemenhan RI 2024).

3.2 Facilitator

Pola fasilitator ini berfokus pada penetapan agenda. Aktor-aktor di sini berfungsi untuk memfasilitasi aktivitas asosiasional, kolaboratif, dan koalisi. Menurut pola ini, koalisi adalah sarana untuk memanfaatkan kekuatan. Aktivitas ini memerlukan perencanaan, penyelenggaraan pertemuan, penetapan prioritas, dan penyusunan (Cooper, Higgott and Nossal 1993).

Memiliki kemampuan untuk membentuk koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Koalisi ini membantu negara

menengah untuk meningkatkan pengaruh mereka dan mempengaruhi keputusan internasional. Mereka juga dapat menggunakan koalisi untuk menghambat agenda yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan indikator utama dari pola ini adalah kemampuan negara-negara menengah untuk mengembangkan inisiatif kolektif yang dapat mempengaruhi agenda global. Serta menetapkan agena seperti perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan pertemuan, dan penetapan prioritas, untuk bekerjasama.

Aplikasi ulang yang dilakukan Indonesia pada pendekatan ini adalah Indonesia membangun aliansi dengan negara lain yang memiliki nilai dan kepentingan yang sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan negara-negara dan organisasi internasional untuk membahas tindakan konkret untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Selain itu, Indonesia juga menggunakan jaringan diplomatiknya untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara dan OIC, sehingga mereka dapat membangun front yang lebih kuat dalam membantu menyelesaikan krisis di Gaza dengan membangun koalisi tersebut. Itu juga dapat memperkuat citranya sebagai negara menengah yang peduli terhadap masalah kemanusiaan di tingkat global.

Dalam mendukung dan merespon isu Gaza, salah satu koalisi yang aktif diikuti Indonesia adalah OIC. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, menekankan pentingnya persatuan OIC *(Organization of Islamic Cooperation)* dalam menangani krisis di Gaza. Dalam pidatonya, Jokowi menyerukan agar negara-negara anggota OIC bersatu dan berada di garis depan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dia menegaskan perlunya tindakan kolektif dan dukungan internasional untuk menghentikan kekerasan serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada

warga Palestina. Jokowi juga menekankan bahwa perdamaian di Gaza tidak akan tercapai tanpa penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina. Dia mendorong OIC untuk memperkuat upaya diplomatik dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina (Presiden RI 2023).

Menteri Luar Negeri saat itu, Retno Marsudi, meminta Organisasi Kerjasama Islam (OIC) untuk berupaya mendesak terjadinya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Dalam pertemuan luar biasa OIC di Jeddah, Marsudi menekankan perlunya pesan kuat untuk mobilisasi dukungan internasional terkait situasi konflik yang memburuk di Gaza. Ia mengusulkan agar OIC mendesak Sidang Umum PBB mengadakan sesi darurat, serta menciptakan koridor kemanusiaan dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Beliau juga menekankan pentingnya melanjutkan proses perdamaian Israel-Palestina untuk mencapai solusi dua negara. Indonesia mengecam serangan Israel terhadap fasilitas sipil, termasuk rumah sakit, dan menolak tindakan yang dapat mengusir penduduk Gaza. Pertemuan OIC dianggap penting untuk memperkuat posisi bersatu dalam menangani situasi yang semakin mengkhawatirkan di Gaza yang diperparah dengan serangan terbaru terhadap Rumah Sakit Al-Ahli Al Arabi pada Oktober 2023 lalu (Yasmin 2023).

Menteri Luar Negeri, Ibu Retno menghadiri OIC Contact Group di Brussel, Belgia. Menteri luar negeri dari negara anggota OIC (Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, Turki, Nigeria, dan Palestina) diberi mandat oleh para pemimpin OIC untuk menjadi orang pertama yang membela Palestina dengan menggunakan teknologi seperti media sosial. Setelah pertemuan di Brussels pada bulan Mei 2024, ketujuh negara tersebut memutuskan untuk melakukan lobi ke beberapa negara,

termasuk lima negara pemegang veto dewan keamanan PBB. Mereka akan melakukan lobi langsung ke Beijing, Moscow, London, Perancis, dan Washington DC dengan pesan bahwa kekejaman Israel harus dihentikan, gencatan senjata harus segera terjadi, dan solusi dua negara harus segera diterapkan. Tujuan utama perjalanan lobi ini adalah selain mendorong implementasi two state solution yaitu juga untuk mendorong negara-negara Eropa agar mengakui negara Palestina (UGM 2024).

Peran OKI dalam perdamaian Timur Tengah ini sangat penting, Indonesia bersama Erdogan Presiden Turki memiliki pendapat yang sama bahwa negara-negara anggota OKI harus bersatu dalam mengadvokasi bantuan yang berkelanjutan. Upaya Indonesia dan Turki sepakat memanfaatkan platform internasional, seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional, untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi warga Palestina, serta menentang tindakan militer Israel. Kemitraan ini mencerminkan strategi kolektif negara-negara mayoritas Muslim dalam menangani krisis kemanusiaan dan memperjuangkan hak-hak Palestina secara global (Presiden RI 2023).

Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis, melalui *shuttle diplomacy* untuk mendorong dukungan terhadap gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Seperti kunjungan yang dilakukan indonesia untuk membangun dukungan bagi upaya perdamaian adalah mengunjungi negara Tiongkok. Kunjungan tersebut menekankan gencatan dan diharapkan Tiongkok dapat meningkatkan peran Indonesia secara signifikan dalam forum Dewan Keamanan PBB. Lalu, kunjungan negara Rusia untuk menegaskan langkah konkret

mengakhiri konflik dan memastikan mudahnya akses bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Selanjutnya kunjungan ke negara Inggris, Indonesia mendesak Inggris untuk bertindak dengan adil mengikuti hukum internasional untuk memperoleh gencatan senjata. Negara kelima yaitu Perancis, dengan harapan sebagai negara yang berpengaruh dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Perancis dapat membantu mengupayakan gencatan senjata (Manurung and Heriamsal 2024).

3.3 Manager

Pola ini menekankan pembangunan lembaga. Pembangunan kelembagaan mencakup pembentukan organisasi formal, pengembangan norma, dan konvensi. Inti dari tahap ini adalah program kerja yang menetapkan pembagian tugas, aktivitas pemantauan, dan kemungkinan pembentukan sekretariat. Pola ini juga melibatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, serta menyelesaikan sengketa. Ini dilakukan melalui diplomasi, forum formal dan informal, dan menciptakan transparansi. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan menunjukkan relevansi inisiatif dengan mengimplementasikan proposal yang praktis (Cooper, Higgott and Nossal 1993).

Dalam merespons agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023-2024, Indonesia mengambil peran penting sebagai *Manager* dalam upaya diplomasi. Pendekatan ini berfokus pada pembangunan lembaga melalui pembentukan organisasi formal, pengembangan norma, dan konvensi, serta langkah-langkah yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, mendorong

pembentukan norma-norma internasional yang menjamin perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter. Selain itu, Indonesia mengusulkan penguatan mekanisme kerja OKI dalam menangani isu Palestina.

Indikator utama pola ini adalah dalam konteks ini, Indonesia juga mengembangkan lembaga UNRWA. Upaya ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina dan menyerukan penyelesaian damai turut membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata negara-negara lain.

Transparansi juga menjadi kunci dalam pendekatan Indonesia, yang secara terbuka mengutuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional di Gaza. Dengan menyampaikan posisi dan usulan terkait penyelesaian konflik di berbagai forum internasional, Indonesia berupaya menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan komunitas global. Dengan segala langkah ini, Indonesia berupaya membangun kerangka kerja yang lebih kuat untuk mencapai perdamaian di Palestina, melalui norma-norma yang jelas, terstruktur, serta diplomasi yang efektif.

Pada konteks pembangunan lembaga, indonesia juga melakukan peningkatan pendanaan dan dukungan kepada UNRWA. Pada tahun 2023, Indonesia melipatgandakan pendanaanya kepada *the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA) yaitu meningkatkan kontribusinya menjadi $1,2 juta. Termasuk bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk meningkatkan penyaluran bantuan tersebut kepada UNRWA. Sejak November 2023, Baznas telah mendistribusikan sekitar $3,3 juta kepada rakyat Palestina. Pendanaan ini bertujuan untuk memperkuat UNRWA agar

mendorong berbagai inisiatif kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina yang terkena dampak konflik (Nasrul 2024).

Selanjutnya, Indonesia dalam tranparansi melalui forum-forum internasional seperti, Kementerian Luar Negeri RI juga ikut serta membahas pernyataan bersama dengan negara-negara ASEAN dalam merespon konflik di Gaza. Sebagai ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia memanfaatkan masa statusnya tersebut dengan baik. Juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN berupaya untuk mengeluarkan posisi bersama meskipun terdapat perbedaan pandangan diantara negara-negara anggota. Indonesia mencari *"lowest common denominator"* untuk mencerminkan pandangan seluruh negara ASEAN. Beliau menegaskan pentingnya merespons situasi tersebut dengan sikap yang terkoordinasi antar negara ASEAN (Achmad and Santosa 2023).

Selain diberikan kepercayaan di ASEAN, Indonesia juga telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2023-2026, pada Oktober 2023 kemarin. Selama menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia mengangkat kembali perhatian dunia terhadap isu Palestina, yang mana isu ini menjadi agenda utama karena isu ini masih sering kali terpinggirkan. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan dalam hal hak asasi manusia di dalam negeri, negara ini masih dipercaya untuk menangani isu HAM secara global. Indonesia berencana untuk memfokuskan perhatian pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta jaminan akses pembangunan, sembari berupaya mencari solusi untuk konflik di Myanmar. Keanggotaan ini merupakan yang keenam kalinya bagi Indonesia, dan kali ini memperoleh suara terbanyak di antara negara-negara Asia-Pasifik. Menlu

Retno Marsudi menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (BBC News 2023).

Selain itu, pada pertemuan ASEAN lainnya adalah pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) ke 17 yang berlangsung di Jakarta pada 16 November 2023 lalu, para menteri pertahanan negara anggota ASEAN kecuali Myanmar sepakat menuntut PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah eskalasi kekerasan dan bencana kemanusiaan di Gaza. Mereka juga menyerukan perlu adanya jalur aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan mendukung *two state solution* berdasarkan perbatasan wilayah yang disepakati serta sejalan dengan hukum internasional dan resolusi DK-PBB. Indonesia yang diwakilkan oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan saat itu, menekankan kewajiban moral negara ASEAN untuk merespon penderitaan rakyat Palestina dan pentingnya persatuan kawasan dalam menghadapi tantangan global. Bahkan pada pertemuan ini Timor Leste juga hadir meskipun masih berstatus sebagai *observer* / pengamat (Mawangi 2023).

Partisipasi Indonesia dalam forum internasional lainnya adalah bergabung dengan para menteri luar negeri ASEAN yang mengutuk serangan Israel di Gaza dalam sebuah komunike bersama yang dikeluarkan pada pertemuan di Vientiane, Laos. Para Menteri Luar Negeri ASEAN ini menyoroti jumlah korban yang tinggi, dengan lebih dari 39.000 warga Palestina tewas dan mengutuk serangan terhadap warga sipil serta infrastruktur. ASEAN juga menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang aman bagi semua yang membutuhkan. Selain itu, mereka menekankan perlunya penyelesaian konflik secara damai berdasarkan prinsip hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Pernyataan tersebut

mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis tersebut.

Mereka mengakui pendapat penasihat ICJ yang menyatakan bahwa PBB harus mempertimbangkan tindakan lebih lanjut untuk segera mengatasi kehadiran ilegal Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Sehingga, ASEAN inisiatif mengajak komunitas internasional untuk terlibat dalam upaya mendukung perdamaian di wilayah tersebut. Dalam deklarasi final tersebut juga mengapresiasi upaya negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menegaskan kembali dukungan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi di Timur Dekat (UNRWA) (Memo 2024).

Selain itu, dalam KTT ASEAN-Australia di Melbourne, isu Gaza menjadi salah satu isu yang diperdebatkan. Para pemimpin negara mengalami kesulitan mencapai kesepakatan mengenai draf pernyataan terkait agresi Israel di Gaza tersebut karena terdapat perpecahan di antara negara-negara anggota, dimana Indonesia, Malaysia, dan negara anggota lainnya yang mendukung Palestina, berupaya mendorong pernyataan yang lebih tegas. Sementara itu, Singapura menolak untuk menggunakan kata "kelaparan" dalam pernyataan tersebut, yang dianggap dapat memicu kemarahan Israel, tidak heran karena Singapura memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Israel dibanding negara anggota ASEAN lainnya. Diskusi ini mencerminkan perbedaan perspektif dalam blok ASEAN yang sekitar 40% nya populasi Muslim dunia (CNN Indonesia 2024).

Tentu saja, pernyataan bersama mengenai agresi Israel di Gaza tersebut merupakan kelanjutan inisiatif Indonesia saat menjadi ketua ASEAN. Indonesia berusaha untuk menggabungkan pandangan negara-negara anggota ASEAN,

termasuk yang mendukung perjuangan Palestina, seperti Malaysia dan dengan negara-negara yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Israel, seperti Singapura. Indonesia berupaya mencari titik temu dalam penyusunan pernyataan, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota. Dengan posisi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan isu Palestina dalam forum internasional dan menciptakan solidaritas di antara negara-negara ASEAN.

Indonesia menggunakan posisinya sebagai *middle power* yang memiliki peran penting sebagai ketua ASEAN dalam menjaga stabilitas sistem multilateralisme melalui institusi internasional untuk mengaktifkan diplomasi mereka. Mendorong solusi multilateral, Indonesia memilih posisi kompromi untuk melibatkan fokus pada isu-isu spesifik seperti isu Gaza. Namun, tidak secara langsung melibatkan kepentingan utama negara-negara besar tersebut seperti negara Australia (CNN Indonesia 2024).

BAB 4

KESIMPULAN

Konflik Gaza 2023–2024 adalah serangkaian konflik dan pertempuran bersenjata antara Israel dan kelompok militan Hamas di Jalur Gaza. Peristiwa ini dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, yang menyebabkan Israel melakukan tindakan militer yang signifikan. Ketegangan ini tidak lepas dari sejarah panjang konflik antara Israel dan Palestina, yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20, dengan akar masalah yang terkait dengan hak asasi manusia, identitas nasional, dan klaim teritorial.

Dampak dari konflik ini sangat besar, terutama dalam hal kemanusiaan, di mana krisis di Gaza semakin memburuk, dengan banyak warga kehilangan rumah serta akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, konflik ini juga berdampak pada dinamika politik internasional, di mana negara-negara dengan kepentingan berbeda mengambil posisi yang beragam. Upaya untuk mengadakan pertemuan darurat di PBB dan forum internasional lainnya menjadi penting dalam merespons situasi ini. Secara keseluruhan, konflik Gaza 2023-2024 mencerminkan kompleksitas dan kesulitan dalam mencapai solusi damai untuk permasalahan yang telah berlangsung lama, di mana upaya diplomasi menjadi sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Respon Pemerintah Indonesia terhadap agresi Israel di Gaza pada tahun 2023-2024 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perdamaian dan keadilan. Indonesia berupaya memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung solusi damai,

dan mendorong negosiasi internasional dengan menggunakan pendekatan *middle powers*. Melalui berbagai inisiatif diplomatik, Indonesia dengan tegas mengecam agresi Israel dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Dengan fokus tiga pola dalam diplomasi Indonesia sebagai negara menengah: sebagai katalis, fasilitator, dan manajer.

Sebagai katalis, Indonesia aktif mengumpulkan dukungan internasional dan mempromosikan dialog di forum-forum seperti PBB dan OKI, serta berperan dalam membangun koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa. Dalam kapasitas sebagai fasilitator, Indonesia berusaha membangun aliansi dan menetapkan agenda yang mendukung perdamaian, termasuk mendorong gencatan senjata dan penyelesaian konflik secara damai.

Sebagai manajer, Indonesia berfokus pada pembangunan norma-norma internasional dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif untuk menangani isu-isu terkait Palestina. Melalui berbagai inisiatif, Indonesia berupaya membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata komunitas internasional, serta menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Maka demikian, dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan merupakan langkah strategis yang penting. Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian damai dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif bukan melalui kekerasan. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina, serta menunjukkan bahwa diplomasi dalam *middle powers* dapat menjadi alat yang cukup efektif untuk mengatasi konflik internasional yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Care International. 2024. “Gaza Humanitarian Snapshot.” *Care International* 1-5.

Darmawan, Asy Syams Wahyu. 2023. “Indonesia's Role in the 2023 Palestinian-Israeli War: A Diplomatic.” 3-6.

Fitri, Aulia. 2024. “Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Perdamaian di Gaza.” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI* 1-2.

Gati, Muhammad Irfan, and Abd. Hafid. 2024. “Indonesia's Diplomatic Contribution to the Israel-Palestine Conflict.” *JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara* 2-8.

Manurung, Felix Broson, and Krisman Heriamsal. 2024. “Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian pada Konflik Terbaru Hamas-Israel.” *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 32-33.

Prihatini, Cantikaputri Febrianti dan Ella Syafputri. 2023. “Parliamentary Diplomacy in Supporting Palestinian.” *E3S Web of Conferences* 2-9.

Roza, Rizki. 2024. “Peningkatan Dukungan Internasional untuk Penghentian Perang di Gaza.” *Info Singkat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan* 1-4.

Satris, Rezki. 2019. “Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel.” *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam* 166-167.

Buku

Cooper, Andrew F., Richard A. Higgott, and dan Kim Richard Nossal. 1993. *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order.* Vancouver: UBC Press.

Masyrofah. 2023. *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina.* Yogyakarta: Deepublish Digital.

Artikel Daring

Achmad, Nirmala Maulana, and Bagus Santosa. 2023. *Kemenlu RI: Indonesia dan Negara-negara ASEAN Sedang Bahas Pernyataan Bersama soal Konflik Israel-Palestina.* 13 October. Accessed December 14, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2023/10/13/16300561/kemenlu-ri-indonesia-dan-negara-negara-asean-sedang-bahas-pernyataan-bersama.

Amnesty International. 2024. *Israel and the Occupied Palestinian Territory*. Accessed October 18, 2024. https://www.reuters.com/world/middle-east/un-chief-says-gaza-becoming-graveyard-children-2023-11-06/.

Baroud, Dr. Ramzy. 2023. *The roots and hidden meanings of 'Al-Aqsa Flood'*. 9 October. Accessed October 6, 2024. https://www.arabnews.com.

BBC. 2023. *Jokowi desak Biden untuk dorong Israel hentikan serangan ke Gaza, tapi 'tidak ditanggapi'*. 2023 November. Accessed November 7, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz92n6mv2njo.

BBC News. 2023. *Indonesia akan angkat perhatian soal Palestina di Dewan HAM PBB.* 14 October. Accessed December 14, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/clw79lwr894o.

BBC. 2023. *Jalur Gaza, salah satu tempat terpadat di dunia yang kini dikepung Israel.* 12 December. Accessed March 2024, 15. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9l3ny5vmvo.

BBC News Indonesia. 2023. *Sejarah Jalur Gaza yang disebut 'penjara terbuka paling besar di dunia'*. 11 October. Accessed March 16, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv23n8n23d9o.

CNN Indonesia. 2024. *ASEAN-Australia Debat Frasa yang Picu Israel Marah di Deklarasi Gaza.* 7 Maret. Accessed December 14, 2024. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240306143132-113-1071161/asean-australia-debat-frasa-yang-picu-israel-marah-di-deklarasi-gaza.

CNN Indonesia. 2023. *Lawan Veto AS, Mesir Pakai Resolusi 377 Desak PBB Rapat soal Gaza Lagi.* 11 December. Accessed March 21, 2024. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231211215639-134-1035905/lawan-veto-as-mesir-pakai-resolusi-377-desak-pbb-rapat-soal-gaza-lagi.

Diakonia IHL Centre. 2024. *2023-2024 Hostilities and Escalating Violence in the oPT.* 12 October. Accessed October 10, 2024. https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events/.

Diakonia. 2023. *Legal Brief on the 2023 Hostilities in Israel and Gaza.* 5 December. Accessed October 20, 2024. https://www.diakonia.se/ihl/news/legal-brief-on-the-2023-hostilities-in-israel-and-gaza/).

Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,M.H., and Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H. 2022. *Peran Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina* . 25 January. Accessed March 9, 2024. https://mh.uma.ac.id/peran-strategi-politik-luar-negeri-indonesia-dalam-mewujudkan-kemerdekaan-palestina/.

DW. 2023. *50 Ribu Warga Gaza Mengungsi ke Selatan.* 9 November. Accessed October 16, 2024. https://www.dw.com/id/perang-israel-hamas-50-ribu-warga-gaza-mengungsi-ke-selatan/a-67349844.

Dwiastono, Rivan. 2024. *Apakah Peran Indonesia Sudah Efektif Membantu Menuntaskan Konflik di Gaza?* 7 October. Accessed December 8, 2024. https://www.voaindonesia.com/a/apakah-peran-indonesia-sudah-efektif-membantu-menuntaskan-konflik-di-gaza-/7812897.html.

Fachri, Ferinda K. 2024. *Suarakan 'Two-State Solution' Terkait Konflik Palestina-Israel.* 2 April. Accessed Februari 21, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/konsistensi-indonesia-suarakan-two-state-solution-terkait-konflik-palestina-israel-lt660aeea4162ea/.

Fitria, and Gilang Rizki Aji Putra. 2022. “Problematika Antara Israel dan Palestina.” *'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan* 41-48.

Hutchinson, Bill. 2023. *Israel-Hamas Conflict: Timeline and Key Developments*. 17 October. Accessed October 20, 2024. https://digital.abcaudio.com/news/israel-hamas-conflict-timeline-and-key-developments.

Katriana, and M Razi Rahman. 2024. Erdogan: *Turki dukung Palestina dengan lebih dari 45 ribu ton bantuan.* 10 April. Accessed December 15, 2024.

https://www.antaranews.com/berita/4053360/erdogan-turki-dukung-palestina-dengan-lebih-dari-45-ribu-ton-bantuan.

Kemenhan RI. 2024. *Bicara di Konferensi Tingkat Tinggi, Menhan Prabowo Tegaskan Kemerdekaan Palestina Solusi Riil Konflik Gaza*. 12 Juni. Accessed October 20, 2024. https://www.kemhan.go.id/2024/06/12/bicara-di-konferensi-tingkat-tinggi-menhan-prabowo-tegaskan-kemerdekaan-palestina-solusi-riil-konflik-gaza.html.

Kemhan. 2024. *Indonesia Berhasil Kirim Bantuan ke Gaza via Pesawat Hercules C130 TNI AU, Kolaborasi dengan Yordania.* 9 April. Accessed November 28, 2024. https://www.kemhan.go.id/2024/04/09/indonesia-berhasil-kirim-bantuan-ke-gaza-via-pesawat-hercules-c130-tni-au-kolaborasi-dengan-yordania.html.

Lee, Matthew. 2023. *The State Department approves the sale of tank ammunition to Israel in a deal that bypasses Congress.* 10 December. Accessed October 17, 2024. https://apnews.com/article/israel-us-emergency-sale-tank-ammunition-war-d3e9b41528433f2da9814d3293996cd5.

Marboen, Ade P. 2024. *Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina.* 21 October. Accessed December 7, 2024. https://www.antaranews.com/berita/4413073/amerika-serikat-pandang-indonesia-mainkan-peran-kunci-soal-palestina.

Mawangi, Genta Tenri. 2023. *Menhan se-ASEAN sepakat kekerasan di Gaza harus segera berhenti.* 17 November. Accessed December 14, 2024. https://www.antaranews.com/berita/3827310/menhan-se-asean-sepakat-kekerasan-di-gaza-harus-segera-berhenti.

Memo. 2024. *ASEAN condemns Israeli attacks in Gaza.* 27 July. Accessed December 14, 2024. https://www.middleeastmonitor.com/20240727-asean-condemns-israeli-attacks-in-gaza/.

Nasrul, Erdy. 2024. *Indonesia Ready to Send More Humanitarian Aid to Gaza Palestine : Prabowo.* 21 October. Accessed December 1, 2024. https://en.republika.co.id/berita/slp1rx451/indonesia-ready-to-send-more-humanitarian-aid-to-gaza-palestine-prabowo.

Nichols, Michelle. 2023. *UN chief says Gaza becoming a 'graveyard for children'.* 7 November. Accessed October 16, 2024. https://www.reuters.com/world/middle-east/un-chief-says-gaza-becoming-graveyard-children-2023-11-06/.

Nugraheny, Dian Erika, and Novianti Setuningsih. 2023. *Kutip Lembaga Australia, Jokowi Sebut Indonesia Negara "Middle Power" di Asia.* 16 Agustus. Accessed November 25, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/16/12571511/kutip-lembaga-australia-jokowi-sebut-indonesia-negara-middle-power-di-asia.

Phillips, Aleks. 2024. *Israeli strikes on Gaza mosque and school kill 26, health ministry says.* 6 October. Accessed October 6, 2024. https://www.bbc.com.

Presiden RI. 2023. *Indonesia-Turki akan Terus Kerja Sama Bantu Palestina.* 12 November. Accessed December 15, 2024. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-turki-akan-terus-kerja-sama-bantu-palestina/.

Presiden RI. 2023. *Presiden Jokowi: OKI Harus Bersatu dan Berada di Depan Selesaikan Krisis di Gaza.* 11 November. Accessed December 15, 2024. https://www.presidenri.go.id/foto/presiden-jokowi-oki-harus-bersatu-dan-berada-di-depan-selesaikan-krisis-di-gaza/.

Satpres, BPMI. 2023. *Indonesia-Turki akan Terus Kerja Sama Bantu Palestina.* 12 November. Accessed December 16, 2024. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-turki-akan-terus-kerja-sama-bantu-palestina/.

Sorongan, Tommy Patrio. 2023. *9 Fakta Terkini Perang Gaza: Israel Menggila-RI Teriak Ini.* 1 December. Accessed March 16, 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231201181234-4-493873/9-fakta-terkini-perang-gaza-israel-menggila-ri-teriak-ini.

Strangio, Sebastian. 2023. *Indonesia's Jokowi Calls for Resolution of Israel-Gaza Conflict Along UN Lines.* 11 October. Accessed March 17, 2024. https://thediplomat.com/2023/10/indonesias-jokowi-calls-for-resolution-of-israel-gaza-conflict-along-un-lines/.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2023. *Israel-Hamas War.* Accessed March 15, 2024. https://www.britannica.com.

The Jakarta Post. 2023. *The Indonesia Hospital in Gaza.* 9 November. Accessed January 2, 2024. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/11/09/the-indonesia-hospital-in-gaza.html#:~:text=%22The%20Indonesia%20Hospital%20in%20Gaza,help%20of%20several%20Indonesian%20volunteers.

The White House. 2023. *Joint Statement on Israel.* 9 October. Accessed October 17, 2024. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/09/joint-statement-on-israel/.

Tim Redaksi CNBC Indonesia. 2023. *PBB Serukan Gencatan Senjata Perang Israel & Hamas.* 28 October. Accessed March 21, 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231028052740-4-484402/pbb-serukan-gencatan-senjata-perang-israel-hamas.

UGM. 2024. *Public Lecture Menteri Luar Negeri RI : Diplomasi Indonesia untuk Palestina.* Yogyakarta, 3 Juni.

UNSCO. 2023. "Statement by UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Tor Wennesland, on the period of paused fighting in Gaza and Israel." *Relief Web Int.* 28 November. Accessed October 15, 2024. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory.

Wahyuni, Willa. 2023. *Aturan Hukum Larangan Pengibaran Bendera Israel.* 4 December. Accessed January 2, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-larangan-pengibaran-bendera-israel-lt656db71e52716/.

Wapres RI. 2024. *Indonesia dan Selandia Baru Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Palestina.* 28 February. Accessed December 16, 2024. https://www.wapresri.go.id/indonesia-dan-selandia-baru-sepakat-dukung-gencatan-senjata-di-palestina/.

Wienanto, Savero Aristia. 2024. *Mantan Menlu Thailand Berharap Indonesia Pimpin ASEAN untuk Akhiri Perang Israel Palestina.* 8 December. Accessed December 14, 2024. https://www.tempo.co/internasional/mantan-menlu-thailand-berharap-indonesia-pimpin-asean-untuk-akhiri-perang-israel-palestina-1178708.

Wiyoga, Pandu. 2024. *Indonesia Tegaskan Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel.* 12 April. Accessed January 2, 2025. https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/04/12/indonesia-tegaskan-tak-buka-hubungan-diplomatik-dengan-israel.

Wuryasti, Fetry. 2024. *Menjadi Middle Power, Buktikan Kekuatan Indonesia Tidak Hanya Dilihat Secara Ekonomi.* 22 January. Accessed November 25, 2024. https://mediaindonesia.com/internasional/645850/menjadi-middle-power-buktikan-kekuatan-indonesia-tidak-hanya-dilihat-secara-ekonomi.

Yasmin, Nur. 2023. *OIC Should Urge for Ceasefire Between Israel, Palestine: Minister.* 20 October. Accessed December 15, 2024. https://voinews.id/index.php/international-news/item/27292-oic-should-urge-for-ceasefire-between-israel-palestine-minister.

Zamzami, Fitriyan. 2024. *Setahun Genosida di Gaza.* 1 October. Accessed October 10, 2024. https://www.republika.id/posts/54937/setahun-genosida-di-gaza.